

Dilema Pendidikan Islam dan Guru Agama

Oleh Abdul Munir Mulkhan^{*)}

Pengantar

Dilema guru seperti terlukis dalam slogan "Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Masyarakat meletakkan guru sebagai sosok manusia ideal pelahir generasi, tapi masyarakat pula yang kurang menghargai profesi guru. Guru dituntut memiliki kemampuan profesional, pengetahuan aktual-terbarukan, tapi dengan gaji tidak memadai sang guru harus bekerja ekstra di luar wilayah profesionalnya seperti jadi tukang ojek bahkan hingga *ngonthel* becak.

Dilema guru dalam lembaga pendidikan Islam, juga guru agama Islam, menjadi lebih lengkap ketika lembaga ini menghadapi problem dilematik yang serupa. Pendidikan Islam berada antara dua wilayah yang selama ini dipahami tidak mungkin disinergikan atau diintegrasikan, yaitu wilayah agama tentang kematian yang sakral dan yang duniawi tentang kehidupan yang sekuler. Padahal seharusnya tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum sehingga memang tidak perlu disinergikan atau

diintegrasikan. Keduanya adalah ilmu dengan obyek kajian berbeda.

Sementara itu, wilayah pertama dipandang serba suci dan yang wilayah kedua dipandang serba rendah yang faktanya berbeda di lapangan empiris. Kenyataan empiris dalam praktik kehidupan keseharian menunjukkan manusia lebih tertarik kepada dunia yang menghidupi daripada yang suci walaupun selalu takut masuk neraka sesudah mati.

Di satu sisi, ilmu keagamaan (Islamic Studies) dipelajari sebagai ilmu (sains) dan dikembangkan, sehingga diletakkan sebagai bidang yang berubah dan berkembang. Di sisi lain ia dipandang sudah final dan tidak bisa dirubah dan dikritik, ketika dikritik sebagai awal dari pengembangan, tiba-tiba ilmu keagamaan itu berubah berganti menjadi ajaran yang final. Pendidikan (Islam) dirancang untuk mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan profesional mengelola dunia, tapi di saat yang sama kehidupan duniawi itu dipandang sekuler.

^{*)} Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulkhan, SU., Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lainnya. Sejak Agustus 2007, menjadi Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Problem dilematik pendidikan Islam lainnya ialah tumpang tindih antara ilmu dan ajaran dalam praktik pendidikan Islam. Di satu sisi Islam dipelajari dalam bentuk ilmu (fikih, kalam, akhlak, dan lain-lain). Di sisi lain hasil pemikiran ulama yang dikonstruksikan dalam bentuk ilmu ke-Islam-an (Islamic Studies) itu, diletakkan sebagai ajaran Islam yang *taken for granted*.

Selain problem yang dikemukakan di atas, dunia kehidupan empirik dipandang bernilai rendah, kotor, penuh maksiat dan dikuasi setan. Di satu sisi muncul gairah untuk menguasai ilmu-ilmu yang selama ini diberi label sekuler. Di saat yang sama ilmu-ilmu sekuler itu dipandang sebagai biang kemerosotan kehidupan, bahkan merendahkan kesalehan. Anak-anak saleh seperti haram menguasai ilmu-ilmu sekuler, di saat yang sama anak-anak saleh itu harus memainkan peran keduniaan.

Demikianlah, dunia pesantrenpun mengalami nasib dan dilema serupa ketika cenderung di"paksa" menyesuaikan diri terhadap ke-modern-an yang berakibat tradisi pesantren yang kaya kearifan lokal itu semakin hilang dari kehidupan praktis. Semestinya tradisi pesantren dikembangkan menjadi lebih berfungsi dan diletakkan sebagai model alternatif kegiatan pendidikan. Fungsional dalam arti bahwa pesantren memang dirancang mampu menjawab persoalan atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan zaman dan umat yang terus berubah dan berkembang seperti telah pernah dilakukan di masa lalu.

Dilema itu memunculkan sejumlah problematik yang dihadapi guru (guru agama Islam) dan pendidikan Islam pada umumnya. Dilema dan problematik demikian itu bisa dilihat dari perubahan status beberapa IAIN/STAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) atau perguruan tinggi agama Islam (PTAI atau PTI) selain pemberian label madrasah sebagai sekolah menengah umum berciri Islam.

Bisa diduga, tanpa pendasaran basis keilmuan baru (epistemologi) yang mapan, nasib ilmu-ilmu keislaman klasik yang selama ini menjadi konsentrasi IAIN/UIN dan STAIN/PTAI, akan hilang atau terbonsai. Pengalaman menunjukkan ilmu-ilmu tersebut yang tercermin dalam fakultas keagamaan akan semakin kehilangan peminat dan pada akhirnya akan terpinggirkan menjadi satu fakultas seperti terjadi di berbagai perguruan tinggi swasta Islam.

Sekurangnya tulisan ini mencoba menjernihkan problema dilematik yang dihadapi dunia pendidikan Islam sebagai dasar pengajuan beberapa gagasan jalan pemecahannya. Suatu ide yang mungkin patut diperhatikan ialah pengembangan pendidikan berbasis spiritual yang dikenal dalam tradisi Sufi (Islam) dan kewaskithaan (Jawa) melalui proyek spiritualisasi lptek.

Ilmu Sekuler dalam Sistem Pengetahuan Islam

Perdebatan tentang ilmu umum dan ilmu agama dalam praktik pendidikan Islam, masih terus berlangsung yang menempatkan ilmu umum pada posisi lebih rendah

daripada ilmu agama (Islamic Studies). Namun demikian faktanya menunjukkan bahwa ilmu umum terus menunjukkan peran dominan dalam praktik kehidupan dan dalam sistem pendidikan terutama di Indonesia. Salah satu penunjuk yang barangkali penting mengenai hal ini ialah berubahnya status IAIN dan STAIN menjadi universitas yang kini menjadi trend umum yang agaknya akan mengubah seluruh sistem pendidikan tinggi Islam negeri atau swasta itu ke bentuk baru.

Dalam bentuk universitas itu, posisi ilmu agama atau Islamic Studies semakin terpinggir lebih karena pasar lebih tertarik pada ilmu umum daripada Islamic Studies yang tercermin dalam fakultas agama dengan segala ragamnya. Terlepas dari ilmu mana yang lebih benar dan lebih baik, kecenderungan tersebut berkaitan dengan fungsi sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi praktis lainnya dari ilmu-ilmu tersebut. Bagaimanapun juga, pada akhirnya ilmu pengetahuan dipelajari dan dikembangkan dengan salah satu tujuan ialah kegunaannya bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ini.

Di satu sisi nasib ilmu-ilmu keagamaan memang penting bagi penuntun kehidupan yang lebih bernilai. Di sisi lain soalnya ilmu-ilmu keagamaan itu harus dapat memberi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan praktis. Karena pada akhirnya ajaran agama yang diwahyukan Allah itu dengan maksud agar hidup manusia di dunia dan sesudah mati akan selamat, nyaman dan sejahtera,

terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya. Tentu saja hal itu juga berkaitan dengan keyakinan akan kenyataan hidup sesudah kematian duniawi setiap manusia nanti.

Dalam hubungan itulah pembelajaran ilmu keagamaan di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan serta pengembangnya, mesti terfokus pada bagaimana memecahkan permasalahan hidup praktis setiap manusia. Fakta empirik seperti pengalaman lembaga pendidikan keagamaan (IAIN, STAIN atau swasta lainnya) menunjukkan semakin tidak terariknya masyarakat terhadap ilmu-ilmu keagamaan akibat kurangnya ilmu-ilmu ini berfungsi bagi kehidupan praktis. Hal itu ditunjukkan semakin kurangnya peminat untuk masuk mendaftar di lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Fakta-fakta semakin kurangnya atau bahkan hilangnya peminat lembaga pendidikan keagamaan di atas, bukan karena warga masyarakat semakin tidak peduli pada agama atau kepada Allah. Soalnya ialah bagaimana praktik keagamaan itu menjadi bagian integral dari pemenuhan kebutuhan hidupnya dan pemecahan permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam banyak kasus, hal itu bisa dilihat dari membludaknya peminat dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan sepanjang lembaga itu juga menjanjikan peluang bagi peserta untuk mengembangkan diri bagi perannya dalam dinamika kehidupan empiris. Bukanlah agama tidak hanya berurusan dengan doktrin-doktrin ritual hubungan manusia

dengan Tuhan?. Bukankah kegiatan ritual itu sekaligus juga berkaitan dengan praktik hidup duniawi?.

Muncul pertanyaan mendasar yang selalu perlu diajukan saat hendak menjadi orang saleh tapi juga sukses dalam kehidupan praktis. Pertanyaan ini kemudian sampai pada perbincangan tentang posisi ilmu umum dan ilmu agama dalam sistem pendidikan Islam. "Apakah benar hanya ilmu yang termasuk ke dalam gugus Islamic Studies saja yang Islami?". Pertanyaan demikian penting diajukan untuk menumbuhkan kesadaran tentang adanya problem internal dalam dunia pendidikan. Problem itulah yang sebagian di antaranya menimbulkan dilema-dilema dalam pengalaman empirik pengembangan dan praktik pendidikan Islam, terutama di Tanah Air.

Ilmu-ilmu yang tergolong Islamic Studies dan problem di atas tercermin dalam sistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Hal ini bisa dilihat dari model pembelajaran dan kurikulum seperti di IAIN (UIN) dan STAIN, UII (Universitas Islam Indonesia), berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan NU yang lebih populer disebut dengan Islamic Studies.

Di satu sisi ilmu-ilmu yang tergolong ke dalam Islamic Studies, seperti; fikih atau syariah, adab, usuluddin, dakwah dan tarbiyah dengan segala bagiannya yang tercermin dalam fakultas agama Islam selama ini sering dipandang lebih suci dan lebih saleh. Sementara ilmu-ilmu non-Islamic Studies seperti ilmu fisika, ekonomi, hukum, psikologi,

kedokteran, biologi, teknik, politik, sosiologi, kehutanan, elektro, peternakan dan lainnya yang tercermin di berbagai fakultas dipandang lebih rendah tingkat kesuciannya atau sekuler. Namun faktanya, ilmu-ilmu yang kurang suci itu lebih diminati daripada ilmu yang lebih saleh.

Pertanyaan berikutnya ialah "apakah benar bahwa sistem pendidikan yang Islami ialah pendidikan model pesantren, madrasah dan sekolah semua tingkatan yang dikelola Muhammadiyah dan NU atau Departemen Agama?" Integrasi ilmu (Islamic Studies dan non Islamic Studies) dalam hubungan dengan persoalan di atas patutlah dipertanyakan, "apa lada dan pertimbangan epistemologisnya?".

Semua ilmu ialah pemahaman dan hasil penelitian, konseptualisasi atau teorisasi atas pengetahuan tentang seluruh alam fisis dan non fisis yang seluruhnya merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, upaya integrasi ilmu sudah kurang tepat sejak awal dan mengandung pemikiran keterpisahan berbagai ragam ilmu itu sendiri.

Di masa lalu, sebelum lahir gerakan pembaharuan pemikiran Islam, tidak ada klasifikasi ilmu islamic studies dan non islamic studies. Klasifikasi pelemagaan pendidikan di negeri ini juga mengundang sejumlah persoalan epistemologis ketika kita selama ini mengenal madrasah, pesantren dan sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Kesan yang muncul, pendirian IAIN, Madrasah dan sekolah-sekolah Islam juga perguruan tinggi swasta

Islam lebih sebagai suatu kebutuhan politik daripada suatu lembaga berbasis epistemologi atau kebutuhan ilmiah. Perubahan IAIN menjadi UIN atau juga perguruan tinggi agama Islam (PTAI/PTI) lebih sebagai kebutuhan pasar daripada kebutuhan ilmiah. Ini tentu tidak salah tetapi soalnya ialah apa yang bisa menjadi landasan epistemologis untuk bisa mengatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam itu menjadi semakin islami dan yang di masa itu lalu kurang islami.

Atas dasar pemikiran itulah dalam kesempatan ini dikemukakan selintas mengenai pengalaman kegiatan keilmuan di masa lalu sekedar menjadi sebuah imajinasi tentang sejarah keilmuan dalam dunia Islam masa lalu tersebut. Salah satu ilmuwan klasik yang selama ini dikenal menolak ilmu-ilmu non-islamic studies ialah Imam al-Ghazali.

Al-Ghazali merekomendasikan pendidikan ilmu-ilmu itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai makrifat. al-Ghazali menolak ilmu-ilmu ini jika hanya sebatas sebagai wacana tanpa buah amal dan sama halnya ia mengecam fukoha, mutakallimin dan ahli tasauf jika tidak membuat mereka semakin mentaati ajaran Allah.

Dalam sebuah buku karya Imam al-Ghazali berjudul *Mizanul Amal* yang mudah didapat di negeri ini dalam bentuk terjemahan dengan judul "Timbangan Amal" terbitan Toha Putra, Semarang tahun 1982. Dalam buku itu ia menyatakan :

"... ilmu inilah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari seluruh ilmu. Ilmu ini adalah ilmu yang mengenal Allah Swt menurut sebenarnya atau ilmu ma'rifatullah. Semua ilmu pengetahuan selainnya (yaitu selain ilmu ma'rifatullah/Pen.) adalah menjadi pembantu bagi ilmu ini, sedangkan ilmu inilah yang bebas tidak terikat dengan lainnya dan tidak menjadi pembantu bagi ilmu pengetahuan lainnya." (1982:181).

Di bagian lain dalam buku yang sama, ia (al-Ghazali) menyatakan : "Ulama ahli tasawuf dan filsafat yang beriman kepada Allah dan hari akhir ... secara garis besar mereka seluruhnya sepakat bahwa kebahagiaan adalah dalam ilmu dan ibadah ... Tidak menyetujui kesepakatan tersebut adalah merupakan kebodohan." (1982:30). Apabila manusia itu dapat mematahkan syahwat dan memaksanya serta akalpun dapat selamat dari belenggunya, ia senantiasa bertafakkur dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan ia juga mau memperhatikan dirinya dan keajaiban-keajaiban yang ada padanya, maka sungguh ia dapat mencapai kesempurnaannya yang istimewa." (1982:31).

Lebih lanjut Imam Al-Ghazali mengatakan : "Saya (al-Ghazali) pernah mendengar seorang tokoh dari pemimpin ahli tasawuf menjelaskan bahwasanya seorang yang sedang

menempuh jalan menuju Allah Swt dapat melihat surga padahal ia masih berada di dunia." (1982:31). "... ilmu pengetahuan dan amal shaleh, keduanya adalah merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Sesungguhnya amal shaleh itu tidaklah dapat terwujud kecuali dengan adanya ilmu pengetahuan tentang tatacara beramal. Segala ilmu, ... seperti ilmu untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan malaikat-malaikatnya adalah merupakan ilmu yang dimaksudkan, karena ilmu tersebut merupakan ilmu yang pokok. ... Adapun mengajarkan ilmu pengetahuan adalah merupakan pekerjaan yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain." (1982:156).

Sementara pekerjaan keterampilan berupa : "... pekerjaan yang pokok, yang menjadikan tegaknya kehidupan di mayapada ini ... ialah: pertanian, pertenunan, pembangunan, politik..." (1982:156). ... Adapun pokok-pokok pekerjaan yang lebih mulai ialah siasat (politik=tata pemerintahan), karena dunia ini tidak dapat tegak dengan penuh perdamaian tanpa adanya tata pemerintahan." (1982:157).

Dalam karyanya yang lain berjudul *Al-Munqidz min Al-Dlalaal*, penjelasan tentang kegunaan ilmu alam dan ilmu sejenis lainnya bisa diperoleh. Buku ini juga mudah diperoleh karena beredar di negeri ini dalam bentuk terjemahan dengan judul "Pembebas dari Kesesatan" terbitan Bintang Pelajar, Gresik tahun 1986.

Dalam bukunya di atas Imam al-Ghazali menyatakan : "... manusia

menurut asal fitrahnya memang diciptakan dalam keadaan kosong (lugu) artinya dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa alamnya Allah ta'ala.... Untuk mengetahui alam diperlukan perantara dan perangkat inteligensi dan setiap inteligensi diciptakan untuk manusia guna mengetahui alam yang terpampang di depan kita. ... dan pada akhirnya Allah menciptakan bagi manusia itu sebuah akal. Dengan akal inilah manusia bisa mengetahui berbagai perkara wajib, beberapa perkara jaiz dan perkara-perkara yang mustahil serta langkah-langkah yang belum pernah dia temui pada periode-periode sebelumnya. Di belakang akal ini terdapat lagi periode lain yang di dalamnya tersingkap mata (penglihatan) lain yang dapat melihat perkara yang ghaib dan apa saja yang akan terjadi mendatang..." (1986:58-59)

"Di antara hukum ilmu bintang terdapat sesuatu yang tidak bakal terjadi kecuali sesudah setiap seribu tahun sekali, lantas bagaimana caranya hal itu bisa diraih dan dicapai hanya sekedar dengan eksperimen (percobaan?). Demikian pula dengan khasiyat-khasiyatnya obat-obatan." (1986:61)

"Dengan bukti ini menjadi jelaslah bahwa di dalam "kemungkinan kenabian", terdapat cara untuk mengetahui perkara-perkara ini yang tidak bisa ditangkap oleh akal, dan inilah yang dimaksudkan dengan *nubuwwah* (kenabian) kerana *nubuwwah* merupakan suatu ibarat daripada perkara-perkara tersebut saja, bahkan mengetahui jenis yang

keluar dari penemuan akal merupakan salah satu khasiat kenabian, disamping itu masih banyak khasiat lainnya.... Adapun khasiat-khasiat kenabian lainnya, hanya bisa diketahui dengan *dzauq* (cita rasa) dari salah satu ajaran kaum Sufi yakni "suluk", sebab ini hanya bisa anda fahami dengan suatu contoh yang telah dikaruniakan kepada anda yaitu tidur..." (1986:61)

"Adapun faedah akal dan manfaatnya ialah supaya kita tahu akan hal-hal yang disebutkan tadi dan bisa menyaksikan kenabian dengan mengakui kebenarannya serta mengerti kelemahan dirinya untuk mengetahui sesuatu yang dapat diketahui dengan mata kenabian dan mengambil dengan tangan kita lalu kita menyerahkannya seperti penyerahan orang buta kepada penuntunnya seperti penyerahan orang sakit yang bingung kepada para dokter yang mengasihaniannya." (1986:67).

Dari berbagai kutipan tadi menjadi jelas bahwa ilmu non-islamic studies ditolak jika dipelajari dengan tujuan menjauhkan diri dari Allah Swt. Tapi jika sebaliknya, dilakukan untuk tujuan mempercepat pencapaian makrifat, sangatlah dianjurkan. Oleh karena itu, hukum mempelajari ilmu ditentukan oleh tujuan dan hasil dari kegiatan tersebut. Seperti pendapat Imam al-Ghazali, seluruh ilmu pengetahuan haruslah menambah kedekatan seseorang dengan Allah dan dipelajari dengan tujuan mencapai ma'rifatullah tersebut.

Dilihat dari ketentuan siapa yang harus mempelajari ilmu yang terpuji (mahmud), Imam al-Ghazali membagi

ilmu dalam kategori ilmu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* karena ilmu itu wajib dipelajari semua pemeluk Islam dan *kifayah* karena jika ada sebagian orang yang mempelajari ilmu ini maka gugurlah kewajiban setiap orang dalam sebuah komunitas. Pembagian demikian didasarkan pada besar-kecilnya manfaat bagi individu dan masyarakat dari ilmu tersebut.

Imam al-Ghazali juga membagi ilmu ke dalam dua kategori yaitu ilmu religius dan ilmu intelektual. Bisa dikatakan bahwa ilmu religius itu hukum mempelajarinya tergolong *fardhu kifayah*. Sedangkan ilmu intelektual bisa dikatakan tergolong ilmu-ilmu yang sekarang dikenal sebagai ilmu umum (ilmu sekuler) atau ilmu non islamic studies. Termasuk dalam ilmu jenis ini ialah matematika, logika, astronomi, musik, fisika, ilmu alam, kedokteran, kimia dan metafisika. Ilmu-ilmu jenis ini bisa dikatakan tergolong *fardhu kifayah* (lihat Osman Bakar, *Hierarki Ilmu, Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi, Mizan*, 1997:234-237).

Persoalan menjadi lain ketika ilmu intelektual tersebut diberi label ilmu umum, ilmu sekuler dan non-islamic studies. Kategori *fardhu kifayah* bukan berarti tidak boleh dipelajari bahkan dalam arti tertentu yakni ketika tidak ada orang yang mempelajri bagi kepentingan umum, maka ilmu seperti kedokteran, hukum mempelajarinya menjadi wajib atau *fardhu*. Akibat lebih jauh dari labelisasi sebagai ilmu sekuler ialah ketidakpedulian masyarakat muslim terhadap ilmu

yang diperlukan oleh publik yang dikategorisasi atau diberi label ilmu yang tertolak atau ilmu yang tidak penting.

Kajian dalam bab-bab berikut akan membahas berbagai persoalan dalam praktik pendidikan Islam di tanah air dalam berbagai sudut pandang. Di dalamnya juga dikaji mengenai problem epistemologi disertai gagasan yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di masa depan. Demikian pula berbagai pengalaman bangsa-bangsa di dunia dari Timur hingga Barat. Dengan mengaca kepada pengalaman masa lalu kita bisa menjangkau masa depan dengan penuh percaya diri.

Sains dan Wahyu¹

Selalu muncul perdebatan di kalangan intelektual muslim; apakah wahyu Allah yang mutlak sempurna itu identik dengan ajaran Islam sebagai hasil pemikiran ulama dan cendekiawan muslim generasi awal (salafi). Perdebatan demikian menyebabkan sulitnya dibedakan antara kemutlakan wahyu dan relativitas pemikiran yang menjadikan wahyu (dan sunnah Rasul) sebagai data. Terjadi tumpang-tindih di antara ajaran Islam yang mutlak benar dan ajaran Islam yang relatif. Hasil pemikiran ulama salaf seperti yang dipelajari di lembaga pendidikan Islam hingga perguruan tinggi dan dihutbahkan dalam komunitas

pemeluk Islam sulit dibedakan dari ajaran Islam sebagaimana firman Allah dan sunnah Rasul.

Kecenderungan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian ringkas pemikiran Islam di dalam perspektif sejarah berikut ini. Islam yang lahir pada awal abad ke 7 M di jazirah Arabia. Dua abad kemudian diduga sudah masuk ke kawasan Nusantara di Samudra Pasai daerah Aceh. Namun, kekuasaan Islam pertama di kawasan ini mulai berdiri sekitar abad ke-13 di saat pusat kekuasaan Islam di Baghdad telah runtuh. Tiga abad kemudian kekuasaan Islam meluas ke Jawa dan terus merembes ke kawasan Indonesia timur.

Pada abad pertama kelahirannya, Islam sudah meluas ke Eropa ketika Umar ibn Khattab memegang jabatan khalifah. Di masa ini pula berlangsung kodifikasi Alquran atas pertimbangan sosial-politik banyaknya penghafal wahyu yang meninggal dunia akibat perang atau usia dan kekhawatiran perpecahan akibat perbedaan pembacaan teks wahyu tersebut. Di akhir pemerintahan Khulafaurrasyidin muncul perpecahan di antara sahabat Nabi dengan lahirnya kaum Khawarij.

Sejarah Islam sesudah itu seperti dipenuhi konflik dan peperangan antara berbagai faksi komunitas pemeluk Islam. Ahli Sunnah Wal Jamaah (Sunni) dan Syi'ah adalah dua faksi besar, selain Qodariah dan Jabariyah, di antara puluhan aliran yang tidak pernah akur di sepanjang

¹Abdul Munir Mulkhan, *Pararelitas Sains dan Wahyu Antara Kemutlakan dan Relativitas Pemikiran Islam*, Disusun dan disampaikan dalam acara Pelatihan History of Thought USC Satunama tanggal 14-19 Nopember 2005 di Balai Pelatihan USC Satunama Sambisari Duwet Sendangsari Sleman.

sejarah Islam. Tidak jarang di antara kedua faksi tersebut terlibat pertempuran seperti di kawasan Irak sekarang. Konflik tersebut semakin rumit ketika satu faksi menyatakan faksi lain telah keluar dari Islam dan kafir.

Klaim-klaim kebenaran sepihak tersebut di atas sebenarnya sudah mulai muncul sejak generasi kenabian (sahabat dan tabiin). Uniknya, gejala konflik demikian justru mendorong munculnya berbagai pemikiran kreatif sekitar abad ke-9 M. Pada masa ini diduga mulai muncul usaha penerjemahan pemikiran Yunani, terutama karya-karya Plato, Aristoteles dan Plotinos.

Salah satu usaha penerjemahan itu dilakukan al-Farabi atas karya Aristoteles (*Organon*) yang di kalangan Islam dikenal sebagai *Mantiq*. Di sisi lain Imam Syafii yang hidup satu abad sebelum al-Farabi mengembangkan ilmu *ushul fiqh* yang mewarnai hampir seluruh pemikiran Islam di bidang kalam (teologi), *fiqh*, *tasauf*, dan sains. Masa ini bisa disebut sebagai era konstruksi ajaran Islam yang kelak menjadi referensi utama berbagai dakwah atau sosialisasi ajaran Islam.

Sesudah itu, komunitas muslim hampir tidak mengenal Islam kecuali sebagaimana hasil pemikiran ulama sekitar abad ke-9 M tersebut. Dari sini mulai muncul perdebatan tentang peran akal di satu pihak dan teks wahyu dan *sunnah* di pihak lain dan antara kemutlakan wahyu dan kerelatifitasan ajaran Islam. Sulit disikapi dengan jernih antara ajaran Islam sebagai hasil pemikiran ulama yang relatif dan ajaran Islam sebagai

wahyu yang mutlak dan serba benar sempurna.

Karya besar ulama pada masa-masa awal sejarah itu kemudian memunculkan keyakinan mengenai kesempurnaan ajaran Islam sebagai identik dengan karya ulama tersebut. Pada tahap lanjut sikap tersebut menyebabkan kemandegan pemikiran yang pada puncaknya mendorong gerakan pemikiran kembali ajaran Islam dengan membuka pintu *ijtihad*. Nama Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ibn Taimiyah, dan Muhammad ibn Abdul Wahab selalu dikaitkan dengan gerakan pembaharuan pemikiran Islam (membuka kembali pintu *ijtihad*) tersebut.

Muncul dua aliran dari gerakan *ijtihad* kembali ini antara *revivalisme* konservatif dan *reformisme* liberal atau antara teks dan konteks yang hingga kini sulit dipertemukan. Persoalan yang selalu muncul kembali ialah bagaimana membuktikan kesempurnaan Islam dalam sejarah. Persoalan lain yang tak kalah penting ialah bagaimana peran fungsional ajaran Islam itu bagi pemecahan masalah yang dihadapi dunia Islam dalam sejarah kehidupan yang terus berubah dan berkembang.

Dalam suasana perdebatan metodologi pemikiran Islam tersebut muncul persoalan politik yang tidak kalah rumit mengenai reposisi dunia Islam dalam situasi global pasca keruntuhan Baghdad abad ke-13 dan kekuasaan terakhir sistem khilafah Turki Usmani. Di sinilah perdebatan muncul di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai

apakah dunia global berada dalam situasi damai (daarussalaam) atau situasi perang (daarulharbi). Secara lebih khusus perdebatan itu berkaitan dengan pertanyaan, apakah perang salib sudah usai atau terus berlangsung.

Posisi Dr. Azahari dan Nur Din M Top bisa dikatakan berada pada situasi kedua yaitu daarulharbi (perang) atau Perang Salib terus berlangsung. Sementara itu pemikir seperti Ibn Rusydi, Ibn Taimiyah atau belakangan ini Hassan Hanafi dan Syahrur, bisa disebut mewakili pandangan sebaliknya mengenai paralelitas sains (filsafat) dengan wahyu tekstual (Alquran).

Reposisi kedua model pandangan tersebut di kemudian hari mengerucut menjadi persoalan hubungan dunia Islam di satu pihak dengan dunia Barat di pihak lain. Pada tahap lanjut ajaran Islam di satu pihak kemudian diletakkan pada posisi berlawanan dengan dan sains modern di pihak lain, teks di satu pihak dan akal serta pengalaman empiris di pihak lain, konservatif di satu sisi dan pemikiran liberal dalam arti paralelitas akal (baca sains) dengan wahyu (baca Alquran) di sisi yang lain.

Secara keseluruhan dan dalam garis besar, persoalan di atas berkaitan dengan pertanyaan apakah filsafat (sains) dipelajari untuk mempertahankan kesucian dan kemutlakan ajaran Islam atau ia sebagai bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Namun, pada umumnya pemikiran Islam dapat disebut belum pernah keluar dari era atau paham skolastisisme. Di sinilah perkembangan Universitas Al-Azhar di

Mesir pada sekitar abad ke-19 atau perubahan IAIN menjadi Universitas lebih merupakan tahap lanjut dari doktrin skolastik. Akibatnya, filsafat dan sains hanya penting dipelajari sepanjang mendukung konstruksi ajaran Islam sebagaimana hasil pemikiran ulama pada sekitar abad ke-9 hingga abad-abad ke-13 M.

Oleh karena itu, masa-masa mendatang pemikiran Islam masih akan didominasi konservatisme tekstual atas paralelitas filsafat dan sains dengan wahyu dan sunnah. Persoalan demikian akan terus mewarnai perdebatan dalam pemikiran Islam terutama sepanjang bisa dicari referensi politik mengenai sikap tidak adil dunia Barat terhadap dunia Islam. Memori kolektif tentang perang salib hampir-hampir tidak pernah kehilangan fungsi sebagai motor utama pemikiran Islam dan bahkan menjadi ruh gerakan Islam (pembaharuan) di berbagai belahan dunia.

Ketidakberdayaan dunia Islam (muslim) yang seperti terpaksa harus memilih jalan modern dengan mempelajari filsafat dan sains modern dengan segala sistem hidup modern, menimbulkan perasaan bersalah dan berdoosa. Rasa berdosa menjadi modern (baca; menjadi Barat) dengan mempelajari filsafat dan sains modern itu kemudian pada tahap lanjut memunculkan sikap radikal penolakan terhadap semua yang berbau Barat. Sikap dan pilihan hidup dengan jelas dan secara jujur dan terbuka diperlihatkan pada teologi mati syahid model Azahari.

Tuhan dan agama-Nya seringkali menjadi topeng hasrat kuasa dari para elite ahli agama. Sebaliknya, mereka cenderung melupakan fungsi otentik agama bagi promosi martabat kemanusiaan yang semakin baik. Warga kebanyakan, rakyat jelata yang miskin dan tertindas, seolah bisa dikorbankan bagi kegembiraan apa yang disebut dan diyakini sebagai Tuhan dengan janji-janji surgawi sesudah kematian.

Atas nama Tuhan, yang hanya bisa dilakukan oleh elite ahli agama, seseorang boleh menghancurkan orang lain secara sepihak atas tuduhan sebagai 'kaum kafir'. Apakah kritik Nietzsche atau Karl Mark benar adanya, akan sangat tergantung kepada para pihak yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai pemimpin gerakan keagamaan itu sendiri.

Reposisi Ilmu dan Ajaran²

Di masa depan, perubahan status dua IAIN (Jakarta dan Yogyakarta) dan satu STAIN (Malang) menjadi universitas, tampak akan segera menjadi model kelembagaan perguruan tinggi Islam. Selama ini, IAIN dan STAIN menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam (islamic studies). Sebagai universitas, lembaga itu juga bertugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu umum (Kepres No. 50 Th 2004, pasal 3 ayat 1 dan 2).

Perubahan status di atas merupakan konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perubahan sosial, dan hajat publik. Sejak tahun 1970-an, lembaga pendidikan Islam pada tingkat madrasah dan pesantren, terus berubah, seperti lembaga pendidikan pada umumnya. Untuk itu diperlukan kurikulum dan pembelajaran berbeda seperti konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Persoalan yang muncul ialah bagaimana posisi ilmu agama Islam dalam struktur iptek dan KBK di atas. Keberadaan dan fungsi institusi pendidikan Islam (tinggi) ditentukan jawaban pertanyaan tersebut. Di sini kita perlu secara objektif meletakkan ilmu agama Islam sebagai ilmu seperti ilmu umum. Keduanya dibedakan dari objek, data, dan metode yang dipakai.

Selama ini kita mengenal tiga sub-struktur iptek: ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Dalam kedudukannya sebagai ilmu, ilmu agama Islam terletak di dalam gugus sub-struktur ilmu humaniora seperti ilmu filsafat, bahasa, dan antropologi. Jika kita konsisten pada posisi ilmu ini, maka integrasi atau islamisasi ilmu bukanlah tuntutan ilmiah tetapi lebih merupakan kebutuhan politik.

Secara de facto, reposisi ilmu agama Islam di atas bisa dilihat dari struktur kelembagaan universitas sebagai perubahan status IAIN dan STAIN. Walaupun demikian, bukanlah

² Abdul Munir Mulkhan, *Reposisi Ilmu dan Ajaran*, disusun dan disampaikan dalam acara *Training of Trainers¹ (TOT) Sistem Manajemen Efektif dan Pembelajaran Aktif* Bagi Instruktur/Trainers Calon Dosen PTAI se Indonesia Angkatan II dan III dalam topik "Principle Structure of Science and Knowledge in IHE" tgl 13 Agustus s/d 8 September 2004 dan September s/d Oktober 2004 di Hotel Sriwedari Yogyakarta.

barang mustahil jika suatu saat kita mengembangkan struktur baru yang menempatkan ilmu agama Islam dalam sub-struktur tersendiri atau akar dari ketiga sub-struktur ilmu. Syarat utamanya ialah pengakuan publik ilmunan baik di tingkat nasional ataupun global.

Dengan demikian, menjadi penting membedakan antara Islam sebagai agama atau ajaran dan sebagai ilmu. Sebagai agama, Islam diyakini pemeluknya bersumber dari wahyu Tuhan yang benar secara mutlak dan berlaku abadi. Sementara Islam sebagai ilmu adalah hasil karya pemikiran ulama atau para ahli dengan mempergunakan wahyu dan atau sunnah Rasul sebagai data. Islam sebagai ilmu dikenai hukum-hukum ilmu yang bersifat historis dan sosiologis dari kehidupan para ulama dan ahli sebagai manusia seperti umumnya ilmunan.

Sementara konstruksi Islam sebagai ajaranpun bisa berbeda di antara pemeluknya sesuai konteks sosio-historis masing-masing. Dari sini mulai terjadi tumpang-tindih Islam sebagai ajaran dan ilmu dari pemikiran ulama yang dalam beberapa persoalan bisa saling berbeda dan bertentangan. Kesamaan sumber atau data dari Alquran atau sunnah Rasul tidak mengurangi peluang perbedaan pemahaman dan kesimpulan atasnya.

Ilmu agama Islam seperti sifat ilmu lainnya, bersifat terbuka dan rasional dalam arti sebagai hasil pemahaman apa yang ditempatkan sebagai data atau sumber ajaran. Sifat terbuka karena setiap orang bisa menggunakan data yang sama (baca : ayat

tertentu atau hadits) untuk dikaji dengan hasil berbeda atau bertentangan. Kebenaran ilmu kemudian dikatakan bersifat relatif, berubah, dan berkembang.

Sebagian ahli berpendapat bahwa suatu hasil pemikiran disebut ilmiah jika bisa mengundang kritik dan pertanyaan baru selain harus bisa diuji ulang. Teori dan pendapat baru yang berbeda dari yang ada sudah merupakan keniscayaan sejarah. Namun demikian, akibat tumpang-tindih ilmu dan ajaran, ilmu agama Islam seperti tidak pernah berubah sejak disusun abad ke-9. Sementara ilmu umum (iptek) berkembang semakin cepat sehingga tidak bisa diakomodasi pendidikan, muncul rekomendasi UNESCO yang mengubah orientasi pembelajaran dari materi iptek ke metodologi dari isi ke konstruksi sebagai basis KBK.

KBK adalah solusi problem pendidikan akibat percepatan temuan iptek yang sebenarnya tidak dihadapi ilmu agama Islam. Namun KBK menjadi penting bagi pembelajaran di perguruan tinggi Islam justru bagi pengembangan ilmu agama Islam itu sendiri. Persoalannya ialah bagaimana kita meletakkan ilmu agama Islam itu sebagai ilmu, bukan sebagai agama. Jika iman seseorang kita yakini sebagai hidayah atau takdir, penguasaannya atas ilmu agama Islam adalah hasil belajar.

Berdasar konsep di atas kita baru bisa meletakkan KBK secara proporsional. Dari sini *learning to know* (LtK) bisa disebut sebagai inti 4 pilar ilmu dan KBK. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana suatu teori dan

pendapat disusun, logika dan argumen yang dipakai serta data yang dikumpulkan para ahli, bisa diciptakan suasana belajar aktif bagi seseorang. Hal ini dirancang guna memanipulasi kegiatan belajar sebagai pengalaman langsung-aktual, di mana peserta didik seperti sedang menapaki tahap-tahap perolehan ilmu dari sang ahli.

Pada tahap lanjut, konstruksi pengalaman berilmu tersebut akan menjadi wadah atau wahana sejumlah materi yang dengan cepat bisa diperkaya dengan membaca buku atau bekerja di laboratorium. Inilah inti dari konsep KBK yang berlaku bagi ilmu umum atau agama Islam.

Perubahan status kelembagaan IAIN dan STAIN di atas, sekaligus menjadi bukti pengakuan *de facto* kesetaraan struktural antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, seperti pengembangan KBK. Jika saja pemahaman dan operasionalisasi ini dilakukan secara lebih tepat, KBK sebenarnya bisa menjadi jembatan bagi pengembangan struktur baru ilmu.

Tapi sayangnya, pengembangan KBK cenderung dilakukan berdasarkan pemahaman yang tidak tepat dan salah tempat (lihat artikel Sdr Waras Kamdi dalam harian Kompas). Kesalahletakkan ini bisa dilihat dari silabi Mata Kuliah Inti Umum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya mata kuliah Filsafat Umum dan Bahasa Indonesia. Soal ini mungkin menarik jika dijadikan bahan praktikum penyusunan silabi.

Pilar pembelajaran (baca; pengetahuan) rekomendasi UNESCO; (a) *learning to know*, (b) *learning to do*,

(c) *learning to life together*, (d) *learning to be*, perlu dipahami secara jernih. Tujuannya ialah agar tidak terperangkap simplifikasi dalam penerapan KBK (Kepmendiknas No. 045/U/2002). Kompetensi selama ini terkesan diartikan sebagai kemampuan praktis (terampil) mengerjakan sesuatu. Akar filosofis KBK bisa dipahami dari pepatah "beri kail agar orang bisa menangkap ikan sesuai kebutuhannya sendiri".

Berdasar basis filosofis dan latar sosiologis kelahiran KBK di atas, maka kegiatan belajar dirancang bukan bagi pengayaan materi ilmu atau cakap kerja, tapi pengayaan pengalaman (langsung-aktual) berilmu dan menjadi diri sendiri. Pembelajaran dirancang untuk memecahkan soal, bukan mengerjakan sesuatu, mengendalikan diri bukan cakap sosial, belajar menjadi diri sendiri bukan meniru suatu pribadi ideal. Dari sini peserta didik mengembangkan daya kreasi dan kediriannya di masa depan yang berbeda dari situasi saat belajar berlangsung.

Kegiatan belajar mengajar dari seluruh ilmu didasari keempat pilar tersebut sebagai suatu kesatuan integral. Masalah terpenting pembelajaran bukanlah isi atau materi ilmu atau cara hidup, tetapi konstruksi dan wahana ilmu dan hidup tersebut. Kegiatan belajar mengajar terfokus fasilitasi peserta didik untuk belajar dalam empat pilar ilmu. Inti keempat pilar itu ialah *learning to know* yang sekaligus merupakan inti KBK.

Pilar pertama ini bisa dipahami sebagai wahana partisipasi aktif setiap peserta didik dalam setiap proses

konstruksi ilmu (metodologi) yang tengah dipelajari. Dari sini realisasi KBK amat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas yang cukup seperti laboratorium, perpustakaan, dan media belajar lainnya. Namun adalah tugas seorang dosen untuk memanipulasi setiap situasi agar peserta didik menjalani sebanyak mungkin pengalaman langsung-aktual berilmu. Dari sini peserta didik memiliki kemampuan kreatif menyelesaikan persoalan yang dihadapi yang berbeda dari situasi saat kegiatan belajar berlangsung.

Dalam pelatihan TOT seperti ini lebih strategis jika setiap peserta mencoba mengembangkan model pembelajaran dari sub-bidang ilmu agama Islam sesuai prinsip dasar ilmu dan KBK. Namun penting bisa dibedakan antara fikih, kalam, akhlak sebagai ilmu dan ajaran. Orang bisa meyakini kebenaran suatu ilmu, tapi tidak langsung berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari tidak seperti ajaran yang diyakini. Perbedaan pandangan dalam beragam ilmu itu niscaya tidak mungkin diikuti dimana ajaran lebih sebagai pilihan (*become learning to be*).

Pembelajaran berbagai bidang ilmu agama Islam seperti ilmu lain lebih pada posisi ilmu dan bukan sebagai ajaran. Soalnya, bagaimana memenuhi pilar *learning to do* dan *to be* serta *life together*. Persoalan ini

lebih tepat diletakkan sebagai pilihan bebas dan kreatif peserta didik sendiri.

Jika kita bisa bersikap objektif seperti demikian, pembelajaran fikih dan ilmu lainnya bisa dikembangkan berdasar model KBK. Fikih misalnya lebih ditekankan pada proses penetapan *kaiffiat* dan etika (*maqa-sid*), bukan pada keterampilan melakukan beragam ibadah dan bukan pada peneguhan keyakinan iman (dalam ilmu kalam/ tauhid).

Kesalahan Pengembangan Iptek³

Selain fungsi ibadah, ilmu-ilmu berfungsi bagi pencapaian tujuan-tujuan ideal kehidupan manusia hingga bisa memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah dan kemakmuran dunia. Nilai ikhlas dari setiap tindakan ialah ketika ia berguna bagi kepentingan publik yang memenuhi prinsip keadilan dari proses hingga hasil tindakan. Soalnya ialah bagaimana nilai-nilai dasar ajaran Islam tersebut patut dipertimbangkan oleh para ahli berbagai bidang ilmu sekaligus menawarkan pemecahan persoalan yang timbul dari kehidupan umat manusia.

Kehidupan masyarakat sebagai produk interaksi manusia yang didasari motif kepentingan pragmatis atau realitas ketiga mempunyai kepentingan tersendiri, masih merupakan bahan perdebatan hingga kini. Sosialisme atau kapitalisme dan jalan ketiga,⁴ tetap mengagendakan

³ Abdul Munir Mulkhan, *Pengembangan Fungsi Kesalahan dalam Ilmu Rekayasa Sosial*, disusun dan disampaikan dalam acara Seminar & Lokakarya "Reintegrasi Epistemologi Pengembangan Keilmuan Di IAIN" dengan topik "Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dalam Perspektif Pemikiran Islam" 18-19 September 2002 di Yogyakarta.

⁴ Anthony Giddens, *The Third Way; Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2000.

pemecahan persoalan keadilan yang hingga kini gagal dipenuhi teori sosial modern selain berbagai masalah moral yang tidak terpecahkan. Wacana tentang berbagai persoalan sosial modern tersebut seperti berada di luar pemikiran Islam yang belum dengan baik menyajikan gagasan teoritis sehingga patut untuk dipertimbangkan para ahli ilmu sosial.

Dalam hubungan di atas, akar transedental kesadaran Islam tentang fungsi *amar makruf nahi munkar* dari setiap tindakan manusia juga belum kompatibel terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah yang muncul di dalam kehidupan sosial. Di sinilah kesalehan (sosial) yang menjadi arahan setiap tindakan personal dan kolektif ajaran Islam perlu dipertimbangkan sebagai nilai dasar ilmu sosial yang mendorong transformasi kehidupan sosial bagi tujuan-tujuan yang semakin transenden. Namun diperlukan sistematisasi metodologis yang memungkinkan bagi setiap orang menjadikannya referensi dan panduan tindakan yang proses dan hasilnya merupakan tesis pemenuhan keadilan sosial yang bukan hanya berkaitan dengan soal distribusi dan konsumsi melainkan meliputi proses produksi sendiri.

Selama ini masalah keadilan yang masih terus perdebatan para ahli ilmu-ilmu sosial diletakkan hanya sebagai persoalan tentang pembagian hasil tindakan sosial tanpa keterkaitan proses, prosedur dan sistem produksi tindakan. Sementara setiap orang mempunyai kemampuan produktif berbeda secara kultural atau struktural,

keadilan hanyalah mimpi mereka yang miskin dan tertindas yang tidak pernah ada dalam realitas kehidupan. Kita tidak pernah bisa membayangkan seseorang atau pun masyarakat membayar zakat, infak, dan sadaqah jabatan atau kerja bagi mereka yang selalu kalah bersaing berebut peluang kerja, pendidikan, dan ekonomi serta politik. Sistem sosial, ekonomi dan politik lebih memberi peluang bagi mereka yang sudah kaya dengan sejumlah jaringan sosial warisan nenek-moyangnya.

Tanpa kerja keras, bahkan tanpa kecerdasanpun, mereka yang kaya mendapat keuntungan ekonomi yang bisa dipakai memenuhi kebutuhan hidup sepanjang hidup hanya dengan sebuah kartu deposito. Posisi sosial yang diterima sebagai warisan, membuat seseorang memiliki sejumlah jabatan dengan keuntungan sosial, ekonomi dan politik berlimpah. Sementara orang lain harus bersaing sengit hanya untuk memperebutkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang tidak memadai. Orang-orang kota dengan kecukupan fasilitas belajar, lebih mudah memperebutkan peluang pendidikan berkualitas dibanding warga pedesaan. Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik merupakan konsekuensi logis struktur feodal profesionalisme modern.

Sementara itu pemikiran sosial Islam belum berhasil dengan baik menyusun sistem sosial, ekonomi dan politik yang didasari *amar makruf nahi munkar* ketika prinsip ini lebih dipahami kehendak Tuhan yang hanya bisa ditunggu atau sebagai dasar mereaksi *kemunkaran* yang diproduksi sistem

sosial modern.⁵ Doktrin sosial Islam *amar makruf nahi munkar* merupakan etos kritik cacat bawaan modernisme dan rekonstruksi sistem sosial berkeadilan di semua proses sosial. *Makruf* dan *munkar* bukan hanya berkaitan dengan moralitas melainkan sistem produksi di bidang sosial, ekonomi dan politik.

Cacat bawaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern, termasuk di bidang sosial (sistem ekonomi, politik, pendidikan) paling mendasar ialah ketika meletakkan kehidupan sosial sebagai produk mekanisme fisik-materiel. Jiwa (ruh) dan akal pikiran manusia bukan diletakkan sebagai realitas unik, tapi kepanjangan dari mekanisme fisis yang materiel. Kepentingan dan kebutuhan hidup manusia terbatas hanya pada dimensi fisik-materiel berkaitan dengan kebutuhan makan, sandang dan papan atau kebutuhan untuk berkuasa. Manusia seolah hidup dalam sebuah ruang kosong tanpa arti ketika hanya bergelimpang dengan dirinya sendiri dan alam sekitar tempat ia hidup dan mati.⁶

Wilayah dan tugas ilmu hanya terbatas pada fungsi penjelasan, penganalisaan dan pemaknaan atas fakta-fakta empirik yang bersifat individual tanpa keterkaitan dengan fakta-fakta meta-empirik dan fakta-fakta universal. Kebenaran ilmiah hanya berhenti pada ke-relativitas-an

dan ke-probabilitas-an dalam dirinya sendiri tanpa keterkaitan terhadap struktur kerucut piramida kebenaran yang bersumber pada dimensi metafisik (gaib), dimana Tuhan berada di puncak piramida realitas kegaiban sebagai Yang Maha Gaib.

Namun demikian, kebenaran ilmiah ini bukan tanpa arti bagi langkah-langkah pencarian kebenaran relatif dan probabel di dalam struktur lebih tinggi. Masalahnya ialah bagaimana daya rasionalitas empirik relatif dan probabel itu tidak dihentikan sebagai mekanisme materiel yang tuntas dan selesai, melainkan ditempatkan sebagai awal dari rasionalitas tanpa akhir yang berenang di dalam lautan metafisika atau kegaiban tersebut.

Pandangan ilmiah atas fakta-fakta empirik yang saling terpisah-pisah secara individual tanpa kaitan dengan kebenaran universum di atas, merupakan akibat dan konsekuensi logis dari penolakan filsafat modern terhadap metafisika.⁷ Fakta-fakta empirik individual menjadi sebuah ruang kosong tanpa makna karena tanpa kaitan dengan struktur realitas lebih tinggi, transenden dan metafisis.

Dengan demikian, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kemanusiaan lain yang sekedar dipahami dari manusia sebagai entitas materiel dan alam fisik itu, perlu didekonstruksi. Di sinilah letak keberartian pandangan Islam tentang

⁵ Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, Mizan, Bandung, 1985.

⁶ Alan Ryan, *The Philosophy of The Social Sciences*, The Macmillan Press Ltd, London, 1977.

⁷ Frithjof Schuon, *Transfigurasi Manusia; Refleksi Antroposofia Perennialis*, Qalam, Yogyakarta, 2002. Lihat juga Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1983.

rantai realitas dan spiritual, ruh atau jiwa sebagai bagian integral eksistensi manusia yang berasal dari Tuhan.⁸

Paradigma kesalehan ilmu sosial, berfungsi bagi jalinan rantai realitas kemanusiaan dan kealaman yang *teleologis*. Pertama, tujuan universal kehendak Tuhan tentang *rahmatan lil alamin* dan tujuan kedua ialah jalinan rantai realitas metafisik. Ukuran kebenaran tidak semata dilihat dari jumlah fakta dan pembawa berita (*mutawatir*) dan rantai tidak terputus (*sanad*), tetapi kualitas pribadi dari setiap mata-rantai yang konsensual atau ijmāi.

Kebenaran relatif dan probabelistik yang tidak pernah selesai diletakkan pada struktur metasisik. Sedangkan rasionalitas empirik diletakkan sebagai awal rasionalitas metafisik yang berhubungan dengan firman dan ayat-ayat *qauliah* dan *kauniah*. Inilah makna akhirat (masa depan teleogis) lebih baik dari yang dekat atau kesementaraan duniawi.

Walaupun bisa mengundang perdebatan, gagasan tentang kehidupan sosial yang bukan sekedar realitas sebagai jumlah tindakan individu atau impersonalitas, melainkan berkaitan dengan jiwa (ruh) sosial, tampak perlu dipertimbangkan. Mehdi Ha'iri Yazdi menyebut unsur ini sebagai *hudhuri*, di mana setiap orang bisa terlibat pada ruh personal dan ruh metafisik yang universal.⁹

amanah dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, bisa difungsikan bagi tujuan-tujuan terjauh di luar dan yang bebas dari kepentingan personal. Tujuan progresif ini tidak hanya dilihat dari pola interaksi manusia dalam waktu aktual yang dijalani oleh suatu generasi dan suatu kesatuan kolektif bangsa atau negara, melainkan bagi tujuan-tujuan dalam waktu potensial di masa depan di luar batasan satuan kolektif bangsa dan negara.

Pandangan materil atau immateril (impersonal) tentang kehidupan sosial di atas, menjadi dasar mengapa hasil produksi ditempatkan sebagai hak milik mutlak pribadi tanpa dimensi hak-hak sosial dan transendental. Kekuasaan politik hanya bertumpu pada legalitas publik sepanjang memperoleh dukungan publik tersebut dengan resiko paling buruk hanyalah lengser dari kekuasaannya. Kehidupan sosial hanyalah hasil interaksi antar manusia dengan tujuan untuk kepentingan setiap warga sepanjang rumusan mereka sendiri. Sementara ilmu-ilmu sosial (ekonomi dan politik) hanya bertugas menemukan fakta-fakta sosial, ekonomi dan politik, menjelaskan atau memberi makna fakta-fakta tersebut.

Pandangan dunia modern tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta ilmu tentang kehidupan tersebut, bersumber dari gagasan tentang manusia sebagai puncak realitas yang hanya berurusan dengan dirinya

⁸ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1980.

⁹ Abdul Munir Mulkhan, "Moral Kenabian; Paradigma Intelektual Dalam Pembangunan", *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Nomor, 4/VII/1997, hlm 43-49.

sendiri.¹⁰ Sementara Islam memandang kehidupan sosial, ekonomi dan politik sekurangnya selain merupakan hasil atau bentuk interaksi antar manusia, sekaligus mengandung nilai dan fungsi transendental yaitu ibadah. Kehidupan sosial bukan hanya hubungan satu garis horizontal atau segitiga piramida, tapi segi lima piramida atau kerucut dengan unsur transendental berada di puncak piramida atau bangun kerucut sosial tersebut.

Pada puncak piramid atau kerucut sosial itulah fungsi dan nilai transendental berupa tanggung jawab setiap orang bagi kebaikan publik sebagai tujuan *profetik*.¹¹ Bukan sekedar mendorong transformasi, tapi bagi tata sosial berkeadilan dan berkemakmuran yang *makruf*. Dari sinilah doktrin sosial tentang *amanah* bisa difungsikan bagi tujuan kolektif (sosial) dan vertikal (tauhid) yang bebas dari kepentingan personal dan faktual. Di sini terletak fungsi *rahmatan lil alamin* yakni bagaimana setiap tindakan sosial seseorang bisa menyumbangkan kerahmatan bagi orang lain sezaman atau pada zaman sesudah masa hidupnya yang disebut *amal jariyah* atau *amal saleh*.

Teleologi profetik mengharuskan rekonstruksi kesatuan ilmu berdasar prinsip kesadaran transendental. Ilmu-ilmu yang selama ini disebut umum ditempatkan ke dalam ilmu agama (*Islamic Studies*) atau sebaliknya ilmu agama (*Islamic Studies*) ke dalam ilmu

umum. Jika *Islamic Studies* tetap kita pakai, maka matematika, fisika, biologi, kimia (*natural sciences*) dan sosiologi, politik, psikologi, ekonomi, filsafat (*social and cultural sciences*) diletakkan di dalam satu kotak bersama kalam, tafsir, fikih, atau sebaliknya. Lebih lanjut bisa dikembangkan sebuah bangun kerucut piramida di mana akar etika transendental dari ilmu kalam, tafsir dan fikih diletakkan di puncak struktur atau dasar kerucut piramida tersebut.

Fungsi iptek bukanlah sekedar sebuah kerja eksplorasi, deskripsi, eksplanasi dan interpretasi fakta-fakta sosial empirik, tetapi sebuah metodologi pemahaman atas rantai realitas untuk mengungkap metafisika tauhid tentang tata hubungan ayat *qauliah* dan *kauniah*. Kerja iptek merupakan langkah awal rekayasa sosial bagi tujuan-tujuan transenden kemakmuran dan rahmat seluruh umat manusia yang di dalam pemikiran Islam bernilai ibadah. Dalam hubungan inilah *amanah* bagi setiap tindakan sosial mungkin berfungsi efektif di dalam sebuah sistem dan mekanisme tanggung jawab sosial yang bisa dievaluasi secara empirik berdasar ukuran-ukuran obyektif yang bersumber dari kerahmatan universal tersebut.

Soalnya ialah apakah kita menerima semua pengalaman intelektual sebagai hasil kerja kreatif manusia yang universal atau merupakan bagian dari pemberian

¹⁰ E. F. Schumacher, *Keluar dari Kemelut; Sebuah Peta Pemikiran Baru*, LP3ES, Jakarta. Lihat juga penulis yang sama dalam *Kecil Itu Indah; Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil*, LP3ES, Jakarta.

¹¹ Kuntowijyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991.

Tuhan melalui takdir dan petunjuk-Nya?. Masalah ini perlu dijawab ketika kita hendak menyusun prosedur ilmiah ilmu sosial yang saleh. Sementara jika kita menerima kesalehan sebagai akar dari setiap kerja ilmu dan tindakan sosial persoalan yang perlu dijelaskan ialah bagaimana menetapkan ukuran kesalehan itu dari seluruh proses penyusunan teori dan penelitian?

Persoalan yang lebih rumit akan muncul ketika ikhlas harus dimasukkan ke dalam setiap tindakan sosial dan ilmiah. Konsep obyektivitas di mana si peneliti tidak memasukkan kepentingannya sendiri secara subyektif bisa dipertimbangkan sebagai tafsir ikhlas bagi tindakan dan penelitian ilmiah. Jika demikian, maka seluruh prosedur ilmiah adalah Islami sepanjang nilai obyektif terbukti.

Persoalan terakhir, bahwa tujuan ilmu sosial bagi kemakmuran publik bisa dipertimbangkan sebagai tafsir dari prinsip *rahmatan lil alamin*. Keberartian kesalehan (profetik) ilmu sosial terletak pada pencapaian tujuan kemakmuran publik yang merupakan bentuk dari keadilan seluruh proses hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Dalam hubungan di atas, kewajiban zakat, ajaran moral infak, sadaqoh atau ibadah berdimensi sosial lainnya perlu dikaitkan dengan proses tindakan bukan hanya diambil dari hasil tindakan. Teori *harapan rasional* pemikiran ekonomi Robert Lucas,¹² mungkin bisa dipakai sebagai referensi

pengembangan fungsi sosial berbagai doktrin ibadah sosial tersebut.

Sekedar contoh, zakat, infak dan sadaqoh atau qurban atau ibadah sosial lainnya, perlu dilakukan untuk memberi peluang kerja dan pendidikan bagi mereka yang secara sosial selalu kalah bersaing. Suatu kekalahan yang bukan akibat mereka tidak profesional dan kreatif, tetapi karena tidak mempunyai peluang menjadi profesional dan kreatif akibat keterbatasan informasi yang bisa mereka akses.

Makrifat Spiritual Iptek¹³

Abad ke-21 seperti menandai perubahan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang mencerminkan pandangan baru tentang hubungan Islam dan iptek modern yang selama ini disebut sekuler. Perubahan demikian bisa dilihat dari alih status IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) yang dimulai dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian disusun IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang. Perubahan status demikian yang sudah terlebih dahulu dialami pendidikan tinggi Islam swasta, tampaknya akan terus berlangsung bagi semua pendidikan tinggi Islam negeri baik IAIN ataupun STAIN di seluruh Indonesia. Seolah mengikuti model PTAI yang sudah ada seperti UII, UM-UM (Universitas Muhammadiyah) dan Unisma (Universitas Islam Malang).

¹²). Abdul Munir Mulkhan, "Moral Kenabian; Paradigma Intelektual Dalam Pembangunan", *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Nomor, 4/VII/1997, hlm 43-49.

¹³). Abdul Munir Mulkhan, *Kurikulum Berbasis Etika Ilmu*, disusun dan disampaikan dalam Roundtable Discussion Pengembangan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 2004.

Berbeda dari universitas umumnya, tugas utama UIN/PTI ialah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu (agama) Islam dan tugas kelembagaan menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu umum. Dalam prakteknya, pembidangan tugas demikian sulit dibedakan, selain mekanisme hukum pasar yang akan menentukan perkembangan keilmuan UIN/PTI tidak berbeda dari pengalaman perguruan tinggi Islam swasta seperti yang selama ini berkembang di tanah air. Tanpa visi dan basis keilmuan yang jelas, maka hukum pasar akan memaksa berbagai bidang ilmu keagamaan yang terlembaga dalam fakultas dan jurusan segera menghadapi kenyataan rendahnya partisipasi publik akibat dari ketersediaan lapangan kerja.

Visi keilmuan bagi status baru perguruan tinggi Islam tersebut bisa dibangun dari bahan sejarah awal perkembangan Islam. Namun untuk bisa membaca bahan sejarah tersebut secara jernih, diperlukan sikap kritis sebagai jalan pembebasan ilmu keagamaan dari sentimen politik, sakralisasi dan ideologisasi. Dari sini bisa dijemihkan sumber bahan dasar ilmu keagamaan dari teks suci Alquran dan Sunnah yang dipandang sakral dan sumber bahan dasar ilmu umum disusun dari sumber bahan dasar realitas alam, fakta sosial, dan pengalaman sejarah yang profan.

Perlu disadari, bahwa bangunan kedua ilmu itu tidak dibedakan hanya karena nilai dan kualitas bahan dasarnya berbeda. Keyakinan bahwa bahan dasar pertama bernilai sakral dengan kebenaran, tetap dan mutlak,

sedang bahan dasar kedua bersifat profan terus berubah dan menjadi dengan kebenaran relatif, tidak mengubah status ilmu yang dibangun dari keduanya sebagai ilmu rasional dan historis.

Persoalan berikutnya ialah fungsi sosial UIN/PTI sebagai lembaga pendidikan (negeri) dan partisipasi masyarakat terhadapnya. Dari sini muncul persoalan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran didik dan sasaran pemanfaatan ilmu. Problem ini bisa disederhanakan dalam sebuah pertanyaan tentang "apakah sasaran tugas penyelenggaraan pendidikan UIN/PTI hanya untuk calon didik dan masyarakat muslim atau seluruh masyarakat tanpa membedakan kepemelukan agama dan apa hubungannya dengan kebutuhan masyarakat?" Memperhatikan legalitas keberadaan UIN/PTI dan fungsi penurunan wahyu dan pengutusan rasul, sudah semestinya jika seluruh masyarakat tanpa membedakan kepemelukan agamanya yang menjadi sasaran didik dan sasaran penerapan ilmu.

Pemecahan persoalan di atas, bisa ditunda dalam arti dilakukan bertahap sesuai proses perubahan status, baik pada tingkat kelembagaan, akademik, dan tradisi intelektual UIN/PTI itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa keterbukaan UIN/PTI kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan kepemelukan agama, sudah merupakan tuntutan sosial, ekonomi, dan sejarah. Kesadaran atas pluralitas sosial dan keagamaan yang berkembang seiring perkembangan

peradaban global mengharuskan lembaga ini segera membangun identitas diri sebagai jangkar dari keterbukaan plural tersebut.

Persoalan visi keilmuan bisa dijelaskan dengan mengurai berbagai kemungkinan bagi perjumpaan dua sistem ilmu yang secara teologis bisa bertentangan tersebut. Perjumpaan dua sistem ilmu yang lebih dikenal dengan integrasi ilmu bisa disusun dalam tiga pilihan strategi :

1. Penegasan *Islamic Studies* sebagai ilmu yang sama dengan ilmu umum. Perbedaan bahan dasar ditempatkan sebagai perbedaan kualitas dan jenis tanpa memberi pengaruh berarti pada konstruksi nilai dari kedua ilmu itu sendiri.
2. Penetapan fungsi kemanusiaan bahan dasar kedua ilmu dan basis aksiologis kedua ilmu tersebut.
3. Pendekatan sosiologis meletakkan integrasi kedua ilmu secara natural melalui dialog antar pengembang kedua ilmu yang bentuknya akan ditentukan oleh hasil akhir dialog keduanya tanpa batas waktu.

Dari ketiga strategi tersebut, pilihan pertama dan kedua bisa diletakkan dalam satu kerangka dasar yang disebut integrasi berbasis etika ilmu. Dari sini bisa dirancang suatu model kurikulum dengan sejumlah pilihan. Sekurangnya terdapat tiga pilihan dalam rancangan kurikulum UIN berbasis etika ilmu. (1) Menyusun sendiri struktur tubuh ilmu; (2) mengikuti struktur tubuh ilmu yang sudah ada; (3) mereposisi *Islamic Studies* dalam struktur tubuh ilmu.

Pilihan pertama merupakan pilihan ideal. Namun keberlakuan pilihan

memerlukan pengakuan komunitas ilmunan di dunia yang membutuhkan waktu cukup panjang. Selain usaha demikian tidak mudah meyakinkan ilmunan, juga harus disusun dengan terlebih dahulu melakukan analisis kritis terhadap bangunan ilmu yang sudah mapan. Paling tidak diperlukan pengakuan dari "penguasa" ilmu di negeri ini yaitu Diknas dan LIPI.

Pilihan kedua memang relatif lebih mudah. Namun pilihan kedua itu akan membuat *Islamic Studies* terpinggir dan menyebabkan fakultas induk (yang sudah ada) akan hilang dari peredaran berikut dosen-dosen di fakultas tersebut seperti Usuluddin, Dakwah, Syariah, Adab, dan Tarbiyah. Kecenderungan demikian bisa dilihat dari pengalaman berbagai perguruan tinggi Islam dalam bentuk universitas (swasta) di tanah air

Pilihan ketiga lebih menarik jika pilihan tersebut ditempatkan sebagai langkah awal bagi pemenuhan pilihan ideal (pertama). Hanya saja pilihan ketiga ini memerlukan sedikit usaha yang serius untuk melakukan tafsir ulang atas ilmu-ilmu yang selama ini berada dalam wadah *Islamic Studies*. Langkah ini bisa dilakukan dengan menemukan pesan etika keilmuan dari ilmu-ilmu *Islamic Studies* bersamaan langkah serupa terhadap ilmu-ilmu *non-Islamic Studies* tersebut yang selama ini biasa disebut ilmu umum atau ilmu sekuler.

Pilihan terakhir (ketiga) tampaknya lebih mudah dibanding pilihan pertama yang akan membuka diskusi konstruktif pengembangan ilmu-ilmu *Islamic Studies* sekaligus pencerahan teologis bagi ilmu-ilmu sekuler (umum).

Di masa depan, pilihan ketiga bukan hanya akan mendorong etos dan kerja penelitian yang kaya, tapi juga membuka berbagai kemungkinan bagi model pengembangan kesatuan struktur tubuh ilmu yang selama ini disebut sebagai integrasi ilmu atau Islamisasi ilmu.

Kesatuan struktur ilmu tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Ketika kita bisa membaca sejarah intelektual muslim di masa awal perkembangannya sebelum kejatuhan Baghdad atau sekurangnya sebelum gempuran besar Imam al-Ghazali.

Namun demikian, yang segera perlu disadari ialah perlunya pengembangan model baru kurikulum khususnya bagi ilmu-ilmu *Islamic Studies* sekaligus sebagai proyek pengembangan mutu akademik bagi tenaga pengajar UIN/PTI yang selama ini berbasis *Islamic Studies*. Proyek ini bukan sesuatu yang mewah atau sulit dilakukan sepanjang kita bersedia membaca ulang seluruh ilmu-ilmu *Islamic Studies* dalam perspektif etika ilmu tersebut.

Dalam hubungan itulah penataan kurikulum UIN/PTI perlu dilakukan dengan dua catatan penting. Dua catatan ini perlu disadari sehubungan dengan fungsi utama penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni, selain fungsi-fungsi sosialnya. Catatan tersebut berkaitan dengan dua langkah yang perlu dilakukan oleh UIN/PTI

Langkah pertama, UIN/PTAI harus konsisten dengan struktur ilmu yang sudah baku, yaitu: ilmu alam (natural),

ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Sekurangnya terdapat dua pilihan untuk konsisten dengan struktur ilmu yang baku tersebut. Pilihan pertama dilakukan dengan menempatkan ilmu-ilmu ke-Islaman (*Islamic Studies*) ke salah satu atau ke ketiga sub-struktur ilmu. Pilihan kedua, menempatkan ilmu kelslaman sebagai sub-struktur tersendiri (keempat) atau membuat struktur yang benar-benar baru. Pilihan ini memerlukan teori baru yang bukan mustahil dilakukan, namun memerlukan diskusi panjang selain harus meyakinkan komunitas ilmunan di dunia.

Langkah kedua, UIN/PTAI secara konsisten menempatkan *Islamic Studies* sebagai disiplin utama dan pengembangan ilmu-ilmu lain sebagai tugas tambahan. Langkah ini berkaitan dengan posisi tiga sub-struktur ilmu (alam, sosial, humaniora) dalam pengembangan ilmu ke-Islaman. Dibanding langkah pertama, langkah kedua ini lebih praktis dan mudah diterima komunitas UIN/PTAI, walaupun tidak gampang dilakukan, kecuali ilmu kelslaman bisa dibedakan dalam dua konsentrasi, yaitu; ilmu murni dan ilmu terapan.

Oleh karena itu, di luar kedua langkah di atas, persoalan penting yang perlu dijernihkan lebih dahulu kedudukan *Islamic Studies* sebagai ilmu yang benar-benar diletakkan sebagai ilmu, bukan ilmu semi agama. Melalui penjernihan demikian perdebatan tentang hubungan agama dan ilmu sudah tidak perlu, karena tidak produktif. Perdebatan tentang posisi dan hubungan tiga sub-struktur ilmu (alam, sosial, dan humaniora) dan

Islamic Studies adalah persoalan kebenaran ilmiah (epistemologi dan metodologi) yang selanjutnya bisa berkaitan dengan problem ontologi (metafisika) dan aksiologi.

Berdasar struktur ilmu baku di atas, persoalan *hadarah al-nash*, *hadarah al-ilm*, dan *hadarah al-falsafah*, lebih jernih jika diletakkan di dan ke dalam tiga sub-struktur ilmu, yaitu: ilmu alam, sosial, dan humaniora, seperti penjelasan di atas. Demikian pula diskusi tentang metodologi (epistemologi) *bayani*, *burhani*, dan *irfani* dalam pembelajaran di UIN/PTAL. Di sinilah letak pentingnya bagi UIN/PTAL untuk konsisten pada pembidangan ilmu yang sudah mapan, yaitu; ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Dalam perkembangannya bisa dikaji lebih lanjut tentang struktur pembidangan ilmu berdasar konsep hierarkhi ilmu yang bersumber dari hierarkhi realitas. Melalui konsep hierarkhi ilmu demikian itu, maka beberapa bidang kajian dalam *Islamic Studies* seperti kajian tentang realitas gaib (metafisis) bisa ditempatkan pada hierarki lebih tinggi. Sementara banyak bidang lain diletakkan pada posisi setara dengan semua bidang ilmu tersebut dengan objek dan metodologi berbeda.

Jika kita berpikir non-hierarkhis dan mencoba menempatkan ilmu keislaman sebagai bidang tersendiri, yang diperlukan ialah argumen bahwa basis epistemologi, metodologi, dan objek dari *Islamic Studies* memang berbeda dari ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Namun argumen ini membutuhkan pengakuan dari

komunitas ilmunan di dunia yang tidak mudah diperoleh walaupun mungkin.

Dalam hubungan itulah, persoalan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*, merupakan persoalan yang penting dibahas sesudah struktur ilmu dijernihkan. Usaha dan langkah demikian bisa dilakukan sesudah menjawab pertanyaan, “apakah *Islamic Studies* sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri, menjadi nilai inti semua ilmu, atau menyebar ke dalam tiga sub-struktur ilmu (alam, sosial, dan humaniora)?”.

Keyakinan atas kesempurnaan ajaran Islam tidak menjadi gugur dengan menempatkan *Islamic Studies* sebagai ilmu. Bukan karena *Islamic Studies* bersumber dari teks wahyu ia identik kesempurnaan Islam sebagai agama wahyu. Penempatan *Islamic Studies* sebagai agama yang karenanya bersifat sempurna, bertentangan dengan tradisi ilmu dan fakta sejarah tentang peran ilmunan muslim (ulama) dalam penyusunan ilmu, selain bertentangan dengan fakta sosiologis perbedaan pandangan di antara ulama tersebut.

Sesuai struktur ilmu di atas, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, yang selama ini dituduh sekuler, bisa dicerahi kesadaran dan kesalehan religius (makrifat) dengan meletakkan ilmu murni ke-Islaman sebagai ilmu inti dari semua cabang ilmu. Selanjutnya, ilmu terapan ke-Islaman (fikih, tarbiyah, dakwah, adab) ditempatkan ke dalam tiga sub-struktur ilmu (alam, sosial, dan humaniora). Pembelajaran ilmu terapan ke-Islaman ini bisa dikembangkan melalui konsep “pendidikan berbasis kompetensi” (lihat skema teratai ilmu).

Dalam struktur kurikulum (baru), ilmu murni ke-Islaman disajikan sebagai kurikulum inti semua program studi bersama ilmu murni dari ilmu alam (seperti fisika murni, matematika), ilmu murni dari ilmu sosial (filsafat (etika), dan ilmu murni humaniora. Terapan ilmu ke-Islaman (fikih, pendidikan atau dakwah keimanan, bukan kalam, dan akhlak), ditempatkan sebagai kompetensi semua program studi yang disesuaikan dengan konsentrasi keilmuan dari masing-masing program studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat dimensi ilmu terapan (teknologi) semua bidang ilmu, dan seni.

Melalui struktur baru di atas persoalan metodologi *bayani*, *burhani*, dan *irfani*, diletakkan dalam kajian epistemologi ilmu-ilmu : alam, sosial, dan humaniora yang berkaitan dengan teori kebenaran (antara lain; korespondensi, koherensi, dan pragmatis) dengan model kerja; eksperimentasi, eksperimentasi, dan pragmatisasi. Di sisi lain, sumber teks, akal, dan tradisi (*bayani*, *burhani*, *irfani*) diletakkan ke dalam satu kajian bersama empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisiisme, dan pragmatisme dalam filsafat modern, serta paradigma lainnya dari ilmu-ilmu: alam, sosial, dan humaniora.

Oleh karena model pembelajaran sesuai struktur baru kurikulum seperti dikemukakan di atas belum ada dalam sistem pendidikan pada umumnya, diperlukan model pembelajaran baru. Model ini bisa dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang liberatif-kritis, penyadaran

transformatif, dan vokasional (pemberdayaan kompetensi). Pengembangan model ini bisa dikembangkan dari model pendidikan Paulo Freire, pendidikan kritis, pendidikan afektif John P. Miller, bersama tiga model kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual) yang sudah ada.

Untuk kepentingan penyiapan tenaga pengajar yang kompatibel dengan model pembelajaran, pengembangan ilmu, dan kurikulum UIN/PTI perlu disiapkan tenaga didik melalui *crossing Studies*. Strategi ini ditempuh untuk mengembangkan kemampuan akademik tenaga didik secara sosiologis melalui studi lanjut yang terstruktur. Melalui strategi ini diharapkan tenaga akademik yang selama ini menekuni berbagai sub-bidang ilmu Islam memiliki penguasaan hingga tingkat ahli dalam berbagai sub-bidang ilmu umum, dan sebaliknya.

Bagi tenaga pengajar yang berasal dari IAIN/PTAI perlu didorong untuk melanjutkan studi di berbagai sub-bidang ilmu umum kealaman, sosial dan humaniora, dan sebaliknya. Demikian pula dengan kegiatan ilmiah dan penelitian tenaga akademik dari kedua bidang ilmu tersebut, harus didorong untuk melakukan kegiatan ilmiah tambahan di berbagai bidang ilmu yang berbeda. Untuk itu perlu disediakan fasilitas pelatihan dan penulisan karya ilmiah berdasar strategi *crossing Studies* tersebut.

Selanjutnya dibentuk lembaga yang bertugas mengembangkan kegiatan *crossing Studies* di bidang penelitian, karya ilmiah dan studi lanjut

bagi tenaga didik di UIN/PTI. Lembaga ini berkedudukan setingkat pembantu rektor yang bertanggungjawab kepada rektor sehingga lebih otonom dan mandiri. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengembangkan kerjasama lintas studi dan lintas lembaga internal dan eksternal dengan berbagai pihak dan masyarakat luas.

Pada akhirnya perlu disusun suatu model kurikulum baru yang jika dikehendaki bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama merupakan tahap transisi, dan selanjutnya bisa disebut sebagai tahap rekonstruksi, dan tahap akhir disebut sebagai tahap pemantapan. Tahap berikut yang diperlukan ialah menyusun paradigma baru dengan mematahkan lebih dahulu semua paradigma ilmu-ilmu yang sudah mapan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Pengembangan paradigma baru tersebut di atas bisa memakan waktu cukup lama, mungkin bisa mencapai hitungan abad, walaupun lebih baik dimulai sekarang jika kita memang memiliki tesis-tesis baru yang meyakinkan kita sendiri. Soalnya ialah apakah kita secara sungguh-sungguh memang memiliki tesis-tesis tersebut atau sikap kita terhadap ilmu-ilmu yang sudah mapan itu lebih didasari sentimen ideologis sebagai reaksi kebangkrutan peradaban Islam di tengah kemajuan peradaban Barat. Mungkin lebih bijak jika pendapat Iqbal dicermati yang menempatkan peradaban Barat sebagai kelanjutan tradisi Islam yang sayangnya mengalami kemandegan sejak lama. Kita bisa belajar dari ilmuan muslim generasi pertama seperti Ibn Sina, al-Farabi, al-Kindi, dan seterusnya.

Hanya setelah masyarakat muslim mengalami kekalahan politik, ilmu-ilmu yang kemudian dikembangkan dunia Barat ditempatkan sebagai ilmu yang tertolak. Pengalaman intelektual dunia Barat itu sendiri memang kemudian menolak menempatkan bidang ketuhanan sebagai objek kajian. Namun, melalui restrukturisasi ilmu-ilmu yang selama ini disebut sekuler, proses pen-saleh-an (pe-makrifat-an) atau spiritualisasi ilmu-ilmu ini mungkin bisa dilakukan. Inilah wajah baru tradisi intelektual Islam sekaligus paradigma ilmu-ilmu di lembaga pendidikan tinggi Islam seperti UIN atau PTAI.

Pada setiap titik silang ilmu dalam skema di atas, etika ilmu bisa sebagai basis kesatuan ilmu-ilmu *Islamic Studies* dan ilmu-ilmu sekuler. Pengenalan terhadap etika ilmu tersebut antara lain bisa dilakukan dengan cara membagi ilmu ke dalam dua tahapan, yaitu, ilmu murni dan ilmu terapan. Jika pada tahap terapan setiap ilmu bisa menunjukkan segi perbedaan yang semakin tajam, maka pada tahap murni yang lebih menonjolkan basis etikanya akan memperlihatkan kepaduannya.

Inti dari apa yang dalam skema di atas disebut ilmu murni itulah yang disebut etika ilmu sebagai titik-masuk integrasi ilmu, karena di tahap etik inilah sebenarnya semua ilmu bisa dipadukan atau tidak mengalami pertentangan berarti. Bukankah semua ilmu merupakan konstruksi pikiran atau pengalaman yang ujungnya diabdikan bagi kepentingan kemanusiaan? Tujuan kemanusiaan itu pula sebenarnya yang terbaca dari risalah kenabian jika ditelusuri basis etik dari risalah kenabian tersebut.

Kerja berikutnya yang perlu dilakukan ialah menyusun ulang ilmu-ilmu *Islamic Studies* terapan yang dilakukan bersama dengan menyusun ulang ilmu-ilmu sekuler terapan. Melalui kerjasama interdisiplin dari para ahli yang tersedia di berbagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air, pekerjaan ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Daya tarik proyek ini terbuka ketika berbagai ilmu sekuler mulai berada pada situasi kejenuhan seperti halnya ilmu-ilmu *Islamic Studies* yang tampak mengalami kehilangan fungsi profetik kenabiannya di tengah perubahan masyarakat dan perkembangan iptek yang cepat dan luas.

Langkah Strategis Pengembangan Pendidikan Islam

(Spiritualisasi atau Sufistisasi Peradaban Global)¹⁴

Peradaban modern berpangkal pengucilan objek metafisika digantikan paradigma ontologi, berkembang lebih cepat dari capaian lebih 2000 tahun sebelumnya. Namun, kemakmuran ekonomi dari jasa iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), lebih dinikmati bangsa-bangsa di kawasan utara dan ketertindasan bangsa di kawasan selatan. Muncul praktik ketidakadilan, pemiskinan, dan dehumanisasi dalam peradaban modern.

Masyarakat muslim di kawasan selatan yang konsisten menempatkan metafisika sebagai objek kajian, cenderung mengabaikan dimensi ontologis fakta-fakta empirik. Bangsa-

bangsa di kawasan ini seperti terperangkap pada keasyikan spiritual tanpa batas. Selain berpendidikan rendah, miskin, dan diperlakukan tidak adil, mereka juga disibukkan oleh berbagai konflik internal.

Konflik epistemologis menjadi sentimen ideologis. Ontologisme memandang ilmu dari objek metafisik dan penyimpulan metafisika sebagai mitos. Sementara sakralisasi *Islamic Studies* menempatkan iptek modern sebagai pengingkaran terselubung kehadiran Tuhan. Bersamaan itu, dunia seperti tanpa pilihan kecuali sebagai pengguna setia jasa iptek modern.

Dalam situasi demikian, cukup menarik spekulasi teoritis fisika dan sains modern mutakhir yang mengindikasikan kerinduan objek metafisika dan spiritualitas (Stephen Hawking dan Danah Johar). Namun peradaban modern tidak cukup berani melakukan re-renaissance (revolusi peradaban) yang lebih mungkin muncul dari bangsa-bangsa tertindas. Syarat utamanya ialah meletakkan ilmu sebagai ilmu dan wahyu sebagai wahyu serta rasionalitas ontologis sebagai tahap awal spiritualitas metafisik.

Perubahan status IAIN menjadi UIN bermakna sejarah jika tradisi intelektual sebelum kelahiran ontologisme (abad modern) bisa ditransformasikan ke dalam tradisi modern. Dari sini UIN dan perguruan tinggi Islam lainnya (PTI atau PTAI), bisa menawarkan strategi pemecahan

¹⁴). Abdul Munir Mulkhan, *Revolusi Peradaban dalam Spiritualisasi Iptek dan Pragmatisasi Ritual* disusun dan disampaikan dalam acara pemilihan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2005-2009 tanggal 20 September 2005

problem konflik, praktik ketidakadilan, pemiskinan dan pembodohan. Namun untuk itu diperlukan dukungan dana cukup besar yang tidak cukup dibebankan pada mahasiswa, bukan hanya bagi penyiapan ruang kuliah dan perkantoran, tapi bagi peningkatan mutu dan rekrutmen dosen serta staf, penyiapan kurikulum, penelitian dan laboratorium.

Dengan begitu, maka perlu dibangun suatu basis epistemologi dalam pengembangan konsep pendidikan, pembelajaran, dan kelembagaan dalam pendidikan Islam. Untuk itu perlu dikaji pengalaman intelektual dan pendidikan masyarakat Islam sebelum peristiwa perang salib dan sebelum lahirnya gerakan Pan-Islamisme.

Basis epistemologi pendidikan (Islam) harus diletakkan bukan sekedar berbeda dari peradaban modern Barat, tetapi harus bisa melampaui rasio modernitas seperti telah dikemukakan di atas. Kesadaran ilahiyah tentang keseluruhan realitas yang tunggal dan sistematis sebagai basis ontologis pendidikan diletakkan sebagai titik awal dan akhir pengembangan dan penerapan iptek. Tujuan dasar pengembangan dan penerapan iptek ialah pengembangan kesejahteraan hidup bangsa dalam peradaban global. Fungsi pendidikan kemudian ialah sebagai media pembelajaran hidup duniawi dan pengabdian kepada Allah (*sabilillah*).

Pengembangan dan penerapan iptek hanya berguna bagi kesejahteraan manusia sepanjang tidak berhenti pada rasionalitas materil. Kritik rasionalitas iptek merupakan

media spiritualisasi objek ontologi empirik yang memungkinkan manusia menyadari kehadiran Tuhan. Ontologi sebagai dasar filosofis peradaban modern perlu diletakkan dalam kesatuan sistematis metafisika.

Oleh karena itu, praktik pembelajaran perlu dibangun sebagai langkah strategis berikut :

1. Penempatan tradisi iptek (termasuk seni) yang rasional sebagai tahap sistematis pengembangan kesadaran ilahiah yang spiritual.
2. Menghidupkan kembali tradisi intelektual klasik yang tidak membedakan secara hierarkhis ilmu kealaman, -sosial dan humaniora; termasuk Islamic studies.
3. Menggali dan mengembangkan tradisi lokal (Indonesia dan Jawa, terutama Sunan Kalijaga) sebagai pengayaan spiritualitas iptek dan peradaban global.
4. Pengembangan dan penerapan iptek sebagai strategi pembelajaran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam tata pergaulan dunia global.
5. Pengembangan sistem kehidupan kampus yang memungkinkan seluruh warga kampus dan masyarakat berperan aktif bagi tujuan UIN atau PTI sesuai kemampuan intelektual dan profesionalnya masing-masing.
6. Pengembangan kehidupan kampus sebagai wujud kesalehan sosial yang secara pragmatis berguna bagi penyelesaian berbagai problem kemanusiaan dalam kehidupan bangsa dan peradaban global.

Strategi pengembangan pendidikan (Islam) meliputi : (a)

pengembangan tradisi intelektual, (b) penjaminan mutu akademik, pembelajaran, dan profesionalitas staf, (c) partisipasi publik (stakeholder), dan (d) peneguhan keunggulan spiritual.

Praktik pendidikan kemudian merupakan sinergi semua kekuatan dan elemen masyarakat ketika pada akhirnya pendidikan dirancang untuk sebuah tata kehidupan sosial yang ideal. Pendidikan adalah bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan masyarakat itu sendiri adalah merupakan laboratorium pendidikan.

Tradisi intelektual. Menumbuhkan tradisi intelektual dua sayap; rasionalitas dan spiritualitas mengatasi peradaban global materialistik dan peradaban Islam transenden. Ontologisme diletakkan sebagai tahap sistematis bersentuhan dengan metafisika ketika Islamic studies tidak terbatas ilmu yang selama ini IAIN dan PTI atau PTAI. Kita bisa menyebut Ibn Sina yang ahli kimia, biologi dan medis sekaligus Islamic studies. Tanpa basis epistemologis dan tradisi intelektual demikian, Islamic studies akan kehilangan peminat.

Soalnya ialah bagaimana mentransformasikan tradisi intelektual muslim klasik ke konstruksi baru yang kompatibel dengan problem peradaban global. Jawabannya antara lain dengan penelitian substansi etik (nilai kemanusiaan), konstruksi epistemologi klasik dan berbagai teori iptek dalam perkembangan mutakhir. Di saat yang sama juga perlu dilakukan pemahaman terhadap pengalaman intelektual dan keagamaan lokal Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Dari

sini bisa ditemukan kearifan spiritual yang kaya guna memperkaya kearifan spiritual Islam dan peradaban modern sekaligus.

Mutu akademik dosen, staf, dan pembelajaran. Pendidikan lanjut dan penelitian dosen diarahkan guna menumbuhkan tradisi intelektual otentik didukung kemampuan profesional staf yang terus dikembangkan. Pembelajaran disusun bagi pengayaan pengalaman rasional, spiritual, dan ritual, tidak terbatas di kelas, tapi seluruh kegiatan kampus, organisasi intra dan ekstra hingga tata hubungan dosen-staf-mahasiswa.

Sumber dana dan manajemen kehidupan kampus. UIN atau PTAI dikelola sebagai media kesejahteraan bersama warga dari tukang sapu hingga guru besar dan rektor, *sengsoro lan nyuargo bareng*. Kesenjangan kesejahteraan yang terlalu tajam antara staf terbawah dengan pimpinan tertinggi kampus, dapat di atasi dengan manajemen keuangan yang terbuka guna membangkitkan partisipasi (handarbeni) seluruh warga kampus.

Kerja berjamaah adalah modal dasar penumbuhan tradisi intelektual UIN atau PTAI sebagai dasar pengembangan iptek berviisi ilahi dan kemanusiaan. Selanjutnya dikembangkan praktik ritual dan iptek sebagai jawaban langsung problem kehidupan warga kampus dan masyarakat sekitar. Melalui kerja sistematis dan terprogram serta melibatkan tiap potensi warga kampus dan masyarakat luas, maka agenda besar itu bisa direalisasi. Kerjasama dengan pengusaha dan pengguna jasa pendidikan perlu dipertimbangkan

sehingga lulusan UIN atau PTAI benar-benar bisa diserap pasar sekaligus diperoleh dukungan dana bagi pengembangan UIN/PTI.

Selanjutnya perlu disusun suatu tata kehidupan kampus yang memungkinkan beragam tradisi Islam dan lokal berfungsi agar tiap warga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kini waktunya kehidupan kampus dibebaskan dari sentimen ideologis tradisi gerakan yang justru melumpuhkan semua potensi dan kekuatan kaya yang dimiliki mahasiswa, dosen, dan karyawan.

Keunggulan spiritual. Melalui kerjasama semua pihak; dosen yang ahli dalam pemikiran klasik hingga sains mutakhir, staf dengan beragam kemampuan profesional, pencapaian tujuan besar UIN/PTI; spiritualisasi iptek atau sufistisasi iptek dan pragmatisasi ritual, bukan mustahil untuk dapat dicapai. Tapi, hanya mengandalkan kemampuan finansial warga kampus dan dana pemerintah, sulit UIN/PTI untuk maju walaupun didasari ide-ide besar yang belum terlalu jelas.

Selanjutnya, dari sinilah kemudian baru bisa dikembangkan keunggulan spiritual atau sufi sekaligus keunikan UIN/PTI yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain. Ini sekaligus sebagai daya tarik untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam negeri dan warga bangsa-bangsa di dunia. Sudah waktunya pemikiran ahli-ahli sufi dikaji dan ditampilkan dalam format dan konteks baru iptek dalam aras global.***

Kepustakaan

Abdul Munir Mul Khan, *Pararelitas Sains dan Wahyu Antara Kemutlakan dan Relativitas Pemikiran Islam*, Makalah untuk Pelatihan History of Thought USC Satunama tanggal 14-19 Nopember 2005 di Balai Pelatihan - USC Satunama Sambisari Duwet Sendangsari Sleman.

—, *Reposisi Ilmu dan Ajaran*, Makalah dalam *Training of Trainers (TOT) - Sistem Manajemen Efektif dan Pembelajaran Aktif Bagi Instruktur/ Trainers Calon Dosen PTAI se Indonesia Angkatan II dan III* dalam topik "Principle Structure of Science and Knowledge in IHE" tgl 13 Agustus s/d 8 September 2004 dan September s/d Oktober 2004 di Hotel Sriwedari Yogyakarta.

—, *Pengembangan Fungsi Kesalehan dalam Ilmu Rekayasa Sosial*, Makalah Seminar & Lokakarya "Reintegrasi Epistemologi Pengembangan Keilmuan Di IAIN" dengan topik "Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dalam Perspektif Pemikiran Islam" 18-19 September 2002 di Yogyakarta.

—, "Moral Kenabian; Paradigma Intelektual dalam Pembangunan", *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Nomor; 4/VII/1997.

—, *Kurikulum Berbasis Etika Ilmu*, Makalah untuk Roundtable Discussion Pengembangan

- Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 2004.
- , *Revolusi Peradaban dalam Spiritualisasi Iptek dan Pragmatisasi Ritual*, Makalah yang disampaikan pada acara pemilihan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2005-2009 tanggal 20 September 2005
- Alan Ryan, 1977, *The Philosophy of The Social Sciences*, London : The Macmillan Press Ltd.
- al-Ghazali, 1982, *Mizanul Amal*, dalam edisi terjemahan berjudul "*Timbangan Amal*", Semarang : Toha Putra
- al-Ghazali, 1986, *Al-Munqidz min Al-Dlalaal*, dalam edisi terjemahan berjudul "Pembebas dari Kesusatan", Gresik : Bintang Pelajar
- Anthony Giddens, 2000, *The Third Way; Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta : Gramedia.
- E. F. Schumacher, *Keluar dari Kemelut; Sebuah Peta Pemikiran Baru*, Jakarta : LP3ES.
- , *Kecil Itu Indah; Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil*, Jakarta : LP3ES.
- Fazlur Rahman, 1983, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka
- Frithjof Schuon, 2002, *Transfigurasi Manusia; Refleksi Antrosophia Perennialis*, Yogyakarta : Qalam.
- Kuntowijyo, 1991, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung : Mizan
- Murtadha Mutahhari, 1985, *Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, Bandung : Mizan